

***Ceritain* atau *Ceritakan*: Berbahasa Indonesia yang Humanis untuk Memanggil Ingatan Saksi dalam Investigasi Kepolisian Kontemporer¹**

R. Dian Dia-an Muniroh
Universitas Pendidikan Indonesia
Pos-el: yanmunir@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan investigasi kasus kriminal di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berpegang pada prinsip humanis, etis dan mempertimbangkan hak asasi manusia. Fakta dan riset di lapangan mengindikasikan adanya beberapa kesenjangan antara prinsip dan praktik. Hal ini diantaranya karena Polri menggunakan teknik interviu standar yang seringnya dipadukan dengan tindak kekerasan. Dalam kancah global, teknik Wawancara Kognitif (WK) merupakan acuan bagi institusi-institusi kepolisian di dunia seperti Inggris, Norwegia, Australia dan New Zealand dalam pengambilan keterangan dari saksi. Ratusan riset ilmiah telah menunjukkan bahwa teknik ini mampu mengumpulkan informasi secara lebih akurat dan andal dari saksi daripada teknik interviu standar. WK yang lahir di Amerika tahun 1984 memiliki seperangkat strategi yang direalisasikan dalam instruksi pemanggilan ingatan yang berbahasa Inggris. Ketika kepolisian Indonesia akan menggunakan teknik ini maka adaptasi terhadap instruksi tersebut penting dilakukan agar kualitas informasi yang diperoleh kongruen dengan WK asli. Kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi instruksi WK yang berterima dalam bahasa Indonesia. Kajian menggunakan metode Delphi (empat putaran) untuk mencapai konsensus ahli yang berjumlah 23 orang. Hasil kajian menunjukkan bahwa instruksi WK yang berterima dalam bahasa Indonesia memiliki tiga dimensi formalitas yakni dimensi penghormatan, profesionalisme dan kehangatan. Makalah ini akan fokus membahas dimensi profesionalisme.

Kata-kata kunci: investigasi, Polri, humanis, saksi, interviu kognitif, bahasa Indonesia, formalitas

PENDAHULUAN

Teknik wawancara kognitif (WK) telah menarik perhatian para peneliti psikologi forensik dari sejak teknik ini lahir pada tahun 1984 oleh R. Edward Geiselman dan kolega-koleganya di Amerika Serikat (lihat Geiselman et al., 1984) hingga kini (mis. Bull, Paulo, & Albuquerque, 2019; Fisher & Geiselman, 2019). Teknik wawancara ini telah terbukti secara empiris (dari hasil eksperimental di laboratorium dan penggunaan nyata di lapangan) efektif mengungkap keterangan dari saksi (terutama yang kooperatif) dengan lebih akurat, terperinci dan andal ketika dibandingkan dengan teknik interviu yang konvensional (mis. Dando, Geiselman, Macleod, & Griffiths, 2016; Griffiths & Milne, 2010; Memon, Meissner, & Fraser, 2010). Dalam kancah global, WK menjadi acuan (*benchmark*) bagi institusi-institusi kepolisian di dunia dan telah diadopsi oleh kepolisian Inggris (Bull et al., 2019), Norwegia (Fahsing & Rachlew, 2009), Australia (Tudor-Owen & Scott, 2016) dan New Zealand (Westera, Zajac, & Brown, 2016) sebagai teknik pengambilan keterangan dari saksi. Hal ini utamanya karena WK merupakan model wawancara yang etis dan humanis (lih. Holmberg & Madsen, 2014), WK memiliki seperangkat strategi yang membantu saksi untuk berkonsentrasi mengingat peristiwa di masa lalu dan mendorong saksi untuk menceritakan

¹ Makalah ini merupakan bagian dari disertasi penulis yang berjudul ‘It is better to see a tiger than a police officer’: Adapting the cognitive interview technique to the Indonesian policing context” (Muniroh, 2019).

1

peristiwa dalam bentuk narasi (keterangan yang panjang) secara leluasa (Fisher & Geiselman, 1992). Strategi tersebut mengandung instruksi atau kata-kata khusus untuk membangkitkan aktifitas kognitif saksi.

Lebih lengkapnya, WK terdiri dari empat strategi pemanggilan ingatan yakni ‘menceritakan semuanya’ (*report everything*), ‘menghidupkan konteks peristiwa’ (*context reinstatement*), ‘mengubah urutan bercerita’ (*change order*) dan ‘mengubah perspektif bercerita’ (*change perspective*). Keempat strategi pemanggilan ingatan ini didasari oleh teori tentang memori. Strategi ‘menceritakan semuanya’ bertujuan untuk mendorong saksi menyampaikan semua hal yang diingatnya tanpa kecuali dan dengan leluasa kepada penyidik. Contoh instruksinya ialah sebagai berikut.

Tabel 1

Contoh instruksi wawancara kognitif ‘menceritakan semuanya’ dalam bahasa Inggris

I realize that this is a difficult task, to remember the details of the crime. All of the details are stored in your mind, but you will have to concentrate very hard to recall them. You have all of the information, so I'm going to expect you to do most of the work here. I understand that this might be difficult, but try to concentrate as hard as you can. ((Fisher & Geiselman, 1992, p. 103)

Strategi ‘menghidupkan konteks peristiwa’ membantu saksi mengingat peristiwa yang pernah dialami dengan cara menghidupkan konteks (posisi saksi waktu itu, yang dilihat saksi waktu itu dll) ketika peristiwa terjadi (lih. Fisher & Geiselman, 1992, p. 100). Strategi ‘mengubah urutan bercerita’ menuntun saksi untuk bercerita mulai dari peristiwa yang paling akhir terjadi terus bergerak ke peristiwa yang paling awal terjadi atau dari tengah terlebih dahulu terus ke awal (lih. Milne & Bull, 1999, p. 99). Strategi ‘mengubah perspektif bercerita’ meminta saksi untuk menceritakan peristiwa dari perspektif orang lain yang ada pada saat peristiwa terjadi (lih. Milne & Bull, 1999, p. 37). Pada tahun 1990-an, Fisher dan Geiselman (1992) menambahkan beberapa strategi komunikasi ke dalam WK yakni ‘membangun hubungan’ (*building rapport*), ‘memanggil ingatan terfokus’ (*focused retrieval*), ‘mengalihkan kendali’ (*transfer of control*) dan ‘bertanya sesuai jawaban saksi’ (*interviewee compatible questioning*).

Cara-cara pengambilan keterangan dari saksi oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) seringkali tidak berbeda dari cara yang digunakan terhadap tersangka (Muniroh & Aziz, 2016), keduanya terindikasi menggunakan pendekatan paramiliter (Meliala, 2001). Dengan cara tersebut, tidak sedikit investigasi yang berujung pada pengakuan yang salah (*false confession*) yang berdampak pada penjatuhan hukuman pada orang yang tidak bersalah (*wrongful conviction*). Fenomena kegagalan hukum sebagai akibat pelanggaran HAM selama penyidikan di Polri ini telah

menjadi sorotan dunia internasional. Respon terhadap hal ini di antaranya datang dari *Norwegian Centre for Human Rights* (NCHR) dalam bentuk program pelatihan penyidikan dengan model wawancara investigasi (Vestheim, 2016). WK ialah salah satu representasi dari wawancara investigasi dan oleh karena itu masuk di dalam materi pelatihan. Program ini berjalan dari mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang—meskipun baru satu tahun sekali, dalam kerangka kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Norwegia.

Kekhasan WK dengan strategi dan kata-kata khusus untuk pemanggilan ingatan ini menjadi tantangan ketika diaplikasikan dalam konteks penyidikan berbahasa Indonesia. Betapa tidak, penelitian mengenai penggunaan WK dengan penerjemah dalam konteks kepolisian Australia yang dilakukan oleh Lai (2016) menunjukkan bahwa instruksi WK tidak mudah diterjemahkan ke dalam bahasa lain, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Benar adanya bahwa di Indonesia, bahasa Inggris merupakan satu-satunya bahasa asing yang wajib diajarkan di sekolah. Meskipun sama-sama berstatus sebagai bahasa asing seperti halnya bahasa Cina, Prancis dan Jepang, bahasa Inggris memiliki kedudukan lebih istimewa (Aziz, 2003; Errington, 2014). Meskipun demikian, level bilingualisme bahasa Inggris di kalangan penutur bahasa Indonesia masih dapat dikatakan rendah (Aziz, 2003). Selain itu, bahasa Indonesia memiliki lansekap kebahasaan yang kompleks, diantaranya adanya kontak bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah telah menimbulkan variasi bahasa Indonesia lisan, fenomena diglosia yang memberikan petunjuk mengenai penggunaan ragam tinggi dalam berbahasa dalam konteks hukum. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, ragam bahasa Indonesia yang seperti apakah yang berterima dalam konteks pemeriksaan polisi. Setakat ini, belum ada penelitian yang mengeksplorasi ini.

Pelatihan wawancara investigasi dengan instruktur dari Norwegia tersebut disampaikan dalam bahasa Inggris sehingga melibatkan penerjemah (bahasa Inggris – bahasa Indonesia) sebagai mediator pelatihan. Melihat kecenderungan rendahnya level bilingualisme bahasa Inggris tersebut, kiranya langkah menghadirkan penerjemah dalam pelatihan sudah tepat, terutama dalam hal membantu para penyidik sebagai peserta pelatihan untuk mengetahui apa yang disampaikan instruktur sehingga bisa mempermudah mereka memahami materi pelatihan. Sayangnya, karena belum pernah ada penelitian khusus mengenai adaptasi instruksi WK dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ketika berhadapan dengan WK, penerjemahan dilaksanakan secara spontan intuitif (*guess-work*) tanpa memperhatikan apakah hasil terjemahan itu (akan) berterima dalam wacana kelembagaan (*institutional discourse*) kepolisian Indonesia dan selaras dengan tujuan WK. Walhasil, hakikat dari WK yang etis, humanis dan partisipatoris (versi bahasa Inggris) bisa jadi tidak tercapai ketika disampaikan dalam bahasa Indonesia.

Senyatanya, WK membawa praktik berwacana tertentu yang apabila diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia maka diperlukan informasi mengenai penggunaan bahasa dalam wacana institusional Polri. Dengan demikian, kita bisa mengetahui tingkat keberterimaan WK dalam konteks Polri. Namun, setakat ini belum ada penelitian yang mengungkap bagaimana wacana institusional wawancara investigasi Polri. Terkait hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Sneddon (2003) tentang diglossia bahasa Indonesia memberikan sedikit arahan mengenai penggunaan ragam bahasa dalam konteks hukum, yakni ragam bahasa Indonesia tinggi [High – H] yang identik dengan ragam formal. Namun, literatur mengenai wacana institusional dalam wawancara investigasi kepolisian seperti yang dikemukakan Heydon (2007) salah satunya menunjukkan bahwa ragam informal (dalam bahasa Inggris) malah efektif membantu penyidik mengungkap keterangan dari saksi anak-anak. Digunakannya ragam informal di dalam setting formal wacana institusional merupakan hal yang sangat mungkin dan ini selaras dengan yang apa diungkapkan oleh Drew dan Heritage (1992) yang tidak membedakan secara kaku antara penggunaan bahasa formal dan informal dalam peristiwa komunikasi wawancara institusional. Makalah ini bertujuan untuk menunjukkan instruksi WK yang seperti apa yang berterima dalam wacana institusional wawancara investigasi Polri. Dengan demikian diharapkan versi WK dalam bahasa Indonesia membantu penyidik Polri untuk dapat berbahasa Indonesia humanis dalam memanggil ingatan saksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Sedikitnya informasi dari literatur mengenai wacana institusional wawancara investigasi Polri dan kebutuhan untuk mengadaptasi instruksi WK ke dalam konteks Polri mendorong peneliti untuk memilih teknik Delphi (menggunakan angket sebagai instrumen penelitian). Teknik Delphi ialah teknik komunikasi terstruktur yang dilakukan melalui mekanisme pengulangan (yang dikenal sebagai putaran) untuk mengumpulkan pendapat dari panel ahli tentang isu-isu yang buktinya sedikit atau tidak ada sama sekali, guna pengambilan keputusan atau membuat prediksi (Keeney, Hasson, & McKenna, 2011).

Instruksi WK dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam lima ragam bahasa Indonesia, merentang dari ragam informal ke ragam formal, kemudian dituangkan ke dalam angket. Partisipan diminta untuk membayangkan mereka sedang diwawancara penyidik sebagai saksi (orang dewasa) dari kasus pencurian. Partisipan kemudian diminta untuk menilai keberterimaan instruksi WK (dalam bahasa Indonesia) dalam skala Likert yang merentang dari sangat berterima (skala 5) ke sangat tidak berterima (skala 1). Di angket tersedia kolom untuk partisipan memberikan komentar atau menyampaikan alasan dari penilaiannya tersebut. Sebagai ilustrasi, Tabel 2 menampilkan

instruksi WK ‘menceritakan semuanya’ dalam ragam tidak terlalu formal dan tidak terlalu informal.

Tabel 2

Contoh instruksi wawancara kognitif di angket Delphi putaran satu

2.	Instruksi	<i>Bapak/Ibu² menyaksikan kejadian tadi pagi. Tolong ceritakan apa pun yang Bapak/Ibu ketahui, termasuk hal-hal kecil yang dikira tidak penting. Ceritakan, walaupun Bapak/Ibu tidak ingat semuanya atau hanya ingat sebagian saja. Apa pun yang muncul dari ingatan Bapak/Ibu, tolong ceritakan semuanya dengan leluasa.</i>				
	Nilai	5	4	3	2	1
	Komentar					

Karena tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan versi instruksi WK yang berterima dalam konteks Polri, peneliti menggunakan Delphi konsensus. Untuk tujuan tersebut, dalam setiap putaran, konsensus pendapat ahli diperlukan. Penelitian ini melibatkan 23 partisipan dan semuanya ahli di bidangnya, lebih spesifiknya tujuh ahli bahasa, enam penerjemah dan sepuluh polisi penyidik. Putaran akan berhenti ketika konsensus ahli tercapai, yakni ketika mencapai tingkat konsensus 60%. Hal ini berarti apabila instruksi WK pada angket belum mencapai 60%, instruksi tersebut akan lanjut ke putaran berikutnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah partisipan yang memilih skala 4 atau 5. Instruksi yang lanjut tersebut telah melalui proses pengolahan dengan mempertimbangkan komentar kualitatif yang partisipan berikan pada putaran sebelumnya. Dari hasil analisis terhadap komentar partisipan, terungkap ada sebelas kategori komentar yakni yang terkait pemilihan kata ganti orang, perubahan kata, saran yang berasal dari pengalaman, pengulangan, kompleksitas, variasi stilistika, kelas sosial, konsen sosial, efek tindakan dan informasi mengenai konteks. Dengan mekanisme ini dari 48 jumlah item angket pada putaran satu, berkurang menjadi 18 item pada putaran dua, berkurang lagi menjadi dua item di putaran tiga yang kemudian baru mencapai konsensus di putaran empat.

PEMBAHASAN

Sebagaimana disampaikan di atas, data untuk penelitian ini bersifat kuantitatif (yakni skala Likert) dan bersifat kualitatif (yakni komentar partisipan terhadap instruksi WK). Pada bagian ini, pembahasan terfokus pada temuan yang berasal dari analisis kualitatif komentar partisipan terhadap instruksi WK (empat putaran Delphi). Salah satu temuan penting yang diperoleh dari data kualitatif ialah fitur kebahasaan instruksi WK dalam konteks Polri. Fitur tersebut ialah formalitas yang mengandung tiga unsur yakni referensi orang (*person reference*), pemilihan kosakata (*choice of vocabulary*) dan partikel wacana (*discourse particles*). Keberadaan ketiga unsur tersebut

² atau kata sapaan akrab hormat lainnya seperti Mas, Mbak, Kang, Teteh, Dok, Prof, atau nama diri

mengindikasikan tiga dimensi formalitas yang secara berturut-turut dimensi penghormatan, profesionalisme dan kehangatan. Ketiga unsur/dimensi tersebut berpadu membangun tingkat formalitas yang berterima untuk instruksi WK dalam konteks Polri, yakni tidak terlalu informal tetapi juga tidak terlalu formal. Untuk kepentingan makalah ini, pembahasan dikerucutkan ke arah temuan mengenai pemilihan kosakata atau terkait dimensi profesionalisme.

Temuan ini terungkap dari komentar partisipan terhadap instruksi WK diantaranya komentar terkait variasi stilistika pada instruksi WK yang disajikan dalam ragam informal. Partisipan menyarankan supaya kata-kata yang menggunakan bahasa Indonesia kasual diganti dengan bahasa Indonesia standar (bandingkan Arka & Yannuar, 2016; Ewing, 2005; Sneddon, 2006). Seperti terlihat di angket, bahasa Indonesia kasual diantaranya ditandai dengan adanya simplifikasi ejaan dan pelafalan (Sneddon, 2006), dan perubahan morfofonemik dalam afiksasi verba (Arka & Yannuar, 2016). Contoh simplifikasi ejaan dan pelafalan terlihat pada komentar partisipan terhadap instruksi ‘membangun hubungan’ yang disajikan dalam ragam informal. Partisipan A1#06 menyarankan supaya peneliti mengganti ‘kalo ngebayangin’ [kasual] diganti dengan ‘kalau membayangkan’ [standar]. Kata ‘kalo’ [kasual] merupakan bentuk simplifikasi dari kata ‘kalau’ [standar]. Contoh dari perubahan morfofonemik dalam afiksasi verba ditemukan pada komentar partisipan A1#06 yang menyarankan peneliti untuk mengganti akhiran –in pada kata ‘ceritain’ [kasual] dengan akhiran –kan sehingga menjadi ‘ceritakan’ [standar] dan untuk mengganti awalan N- dalam kata ‘ngebayangin’ [kasual] dengan awalan mem- sehingga menjadi ‘membayangkan’ [standar]. Hal ini mengindikasikan adanya kesadaran dari partisipan untuk memenuhi ekspektasi formalitas dan penggunaan kode-kode formal dalam wawancara investigasi di kepolisian (Arka & Yannuar, 2016; Labov, 1972).

Salah satu implikasi dari penggunaan bahasa Indonesia standar dalam konteks wawancara investigasi di kepolisian ialah bahwa saksi pun diharapkan untuk menggunakan ragam bahasa yang standar. Terkait hal ini, penelitian tentang kelompok bahasa minoritas dalam proses hukum (contohnya Eades, 2003, 2010) menunjukkan bahwa kelompok ini cenderung menggunakan bahasa kasual yang menjadi penanda dari status sosial rendah. Meskipun penggunaan bentuk bahasa Indonesia standar lebih karena faktor konteks daripada status sosial, faktor kuasa pun memegang peranan. Walhasil, terjadi percampuran yang tidak kentara antara kuasa dan konteks. Ketika solidaritas dan kuasa diperhitungkan dalam wacana kepolisian, kecenderungan partisipan untuk menggunakan bahasa Indonesia standar menunjukkan penggunaan ‘kuasa’ penyidik sendiri.

Kemampuan berbahasa Indonesia standar kebanyakan diperoleh dari bangku sekolah (bandingkan Hudson, 1994), oleh karena itu pengetahuan atau kemampuan untuk menggunakan bahasa Indonesia standar menjadi sumber kuasa yang merepresentasikan peran polisi penyidik dalam

institusi hukum (berkenaan dengan kualitas institusional dan profesional). Dengan menggunakan bahasa Indonesia standar, polisi penyidik diduga sedang berupaya untuk membangun hubungan professional (bukan personal) dengan saksi. Hal ini selaras dengan model WK yang mendukung pewawancara untuk membangun hubungan professional dengan terwawancara sehingga timbul rasa percaya untuk berbagi segala informasi tentang peristiwa (Shepherd & Griffiths, 2013).

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa bahasa Indonesia mengakomodasi kemunculan formalitas. Dalam sociolinguistik, fenomena kebahasaan ini bisa dijelaskan dengan merujuk ke fenomena diglosia bahasa. Menurut Sneddon (2003), kedua ragam bahasa Indonesia yang ekstrim yakni bahasa Indonesia (ragam tinggi) dan bahasa Indonesia kasual (ragam rendah) digunakan dalam kontinum oleh komunitas bahasa di dalam situasi kebahasaan yang berbeda. Ragam tinggi digunakan di latar pemerintahan, kepentingan administrasi dan hukum sebagaimana halnya dalam situasi-situasi formal seperti pidato, pengajaran, pendidikan, sastra dan media. Berkebalikan dengan ragam tinggi, ragam rendah digunakan di rumah dan dalam percakapan kasual. Kecenderungan partisipan terhadap bahasa Indonesia standar meyakinkan bahwa kualitas profesionalisme penyidik berada dalam kontinum personal-profesional dan memerlukan formalitas. Formalitas dan dimensi profesionalisme ini menjadi salah satu fitur wacana institusional wawancara investigasi Polri.

PENUTUP

Dengan terungkapnya salah satu fitur wacana institusional wawancara investigasi Polri yakni formalitas dengan dimensi profesionalisme, instruksi WK dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan lebih berterima. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih penggunaan kata-kata dalam bahasa Indonesia standar. Namun perlu diingat bahwa formalitas ini memiliki tiga dimensi selain profesionalisme yaitu dimensi penghormatan dan kehangatan. Dengan demikian, menggunakan bahasa standar saja tidak cukup untuk menggambarkan level formalitas yang berterima dalam konteks WK di Polri. Selaras dengan nilai WK yang humanis, ketika penyidik menggunakan instruksi WK yang berterima dalam konteks wawancara investigasi Polri maka secara tidak langsung penyidik telah berbahasa humanis dalam memanggil ingatan saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arka, I. W., & Yannuar, N. (2016). On the morphosyntax and pragmatics of *-in* in Colloquial Jakartan Indonesian. *Indonesia and the Malay World*, 44(130), 342-364.
doi:<https://doi.org/10.1080/13639811.2016.1215129>
- Aziz, E. A. (2003). Indonesian English: What's *det tuh*? *TEFLIN Journal*, 16(1), 140-148.
doi:<http://doi.org/10.15639/teflinjournal.v14i1/140-148>
- Bull, R., Paulo, R. M., & Albuquerque, P. B. (2019). The impact of the cognitive interview in the UK and recent research in Portugal. In J. J. Dickinson, N. S. Compo, R. N. Carol, B. L.

- Schwartz, & M. R. McCauley (Eds.), *Evidence-based investigative interviewing: Applying cognitive principles* (pp. 29-41). New York: Routledge.
- Dando, C. J., Geiselman, R. E., Macleod, N., & Griffiths, A. (2016). Interviewing adult witnesses and victims. In G. Oxburgh, T. Myklebust, T. Grant, & R. Milne (Eds.), *Communication in investigative and legal contexts: Integrated approaches from forensic psychology, linguistics and law enforcement* (pp. 79-102). UK: John Wiley & Sons, Ltd.
- Drew, P., & Heritage, J. (1992). *Talk at work: Interaction in institutional settings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eades, D. (2003). Participation of second language and second dialect speakers in the legal system. *Annual Review of Applied Linguistics*, 23, 113-133.
doi:<https://doi.org/10.1017/S0267190503000229>
- Eades, D. (2010). *Sociolinguistics and the legal process*. UK: Multilingual Matters.
- Errington, J. J. (2014). Indonesian among Indonesia's languages. In E. Tagliocozzo (Ed.), *Producing Indonesia: The state of the field of Indonesian Studies* (pp. 185-193). Ithaca, NY: Southeast Asia Program, Cornell University.
- Ewing, M. C. (2005). Colloquial Indonesian. In K. A. Adelaar & N. P. Himmelmann (Eds.), *The Austronesian languages of Asia and Madagascar* (pp. 227-258). New York: Routledge.
- Fahsing, I. A., & Rachlew, A. (2009). Investigative interviewing in the Nordic region. In T. Williamson, R. Milne, & S. P. Savage (Eds.), *International developments in investigative interviewing* (pp. 39-65). Cullompton, UK: Willan Publishing.
- Fisher, R. P., & Geiselman, R. E. (1992). *Memory-enhancing techniques for investigative interviewing: The cognitive interview*. Springfield: Charles C. Thomas.
- Fisher, R. P., & Geiselman, R. E. (2019). Expanding the cognitive interview to non-criminal investigations. In J. J. Dickinson, N. S. Compo, R. N. Carol, B. L. Schwartz, & M. R. McCauley (Eds.), *Evidence-based investigative interviewing: Applying cognitive principles* (pp. 1-28). New York: Routledge.
- Geiselman, R. E., Fisher, R. P., Firstenberg, I., Hutton, L. A., Sullivan, S., Avetissian, I., & Prosk, A. (1984). Enhancement of eyewitness memory: An empirical evaluation of the cognitive interview. *Journal of Police Science and Administration*, 12, 74-80.
- Griffiths, A., & Milne, R. (2010). The application of cognitive interview techniques as part of an investigation. In C. Ireland & J. Fisher (Eds.), *Consultancy and advising in forensic practice: Empirical and practical guidelines* (pp. 71-90). UK: John Wiley & Sons Ltd.
- Heydon, G. (2007). The importance of being (in)formal: Discourse strategies in police interviews with children. In K. Kredens, S. Goz'dz'-Roszkowski, & B. Lewandowska-Tomaszczyk (Eds.), *Language and the law: International outlooks* (pp. 279-303). Germany: Peter Lang, Frankfurt am Main.
- Holmberg, U., & Madsen, K. (2014). Rapport operationalized as a humanitarian interview in investigative interview settings. *Psychiatry, Psychology and Law*, 21(4), 591-610.
doi:<https://doi.org/10.1080/13218719.2013.873975>
- Hudson, A. (1994). Diglossia as a special case of register variation. In D. Biber & E. Finegan (Eds.), *Sociolinguistic perspectives on register* (pp. 294-314). Oxford: Oxford University Press.
- Keeney, S., Hasson, F., & McKenna, H. P. (2011). *The Delphi technique in nursing and health research*. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Labov, W. (1972). *Sociolinguistic patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Lai, M. (2016). *Police cognitive interviews conducted through interpreters - an experimental study of the inherent conflicts in interlingual operations*. (Doctoral dissertation), RMIT University, Melbourne. Retrieved from <http://researchbank.rmit.edu.au/view/rmit:162065>
- Meliala, A. E. (2001). Police as military: Indonesia's experience. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 24(3), 420-432.
doi:<https://doi.org/10.1108/EUM0000000005853>
- Memon, A., Meissner, C. A., & Fraser, J. (2010). The cognitive interview: A meta-analytic review and study space analysis of the past 25 years. *Psychology, Public, Policy, and Law*, 16(4), 340-372. doi:<https://doi.org/10.1037/a0020518>

- Milne, R., & Bull, R. (1999). *Investigative interviewing: Psychology and practice*. England: John Wiley & Sons Ltd.
- Muniroh, R. D. D. (2019). *'It's better to see a tiger than a police officer': Adapting the cognitive interview technique to the Indonesian policing context*. (PhD Dissertation), RMIT University, Melbourne, Australia.
- Muniroh, R. D. D., & Aziz, E. A. (2016). The contemporary practices of Indonesian police interviewing of witnesses In D. Walsh, G. E. Oxburgh, A. D. Redlich, & T. Myklebust (Eds.), *International developments and practices in investigative interviewing and interrogation Volume 1: victims and witnesses* (pp. 7-18). New York: Routledge.
- Shepherd, E., & Griffiths, A. (2013). *Investigative interviewing: The conversation management approach* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Sneddon, J. N. (2003). Diglossia in Indonesian. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde*, 159(4), 519-549. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1125133943?accountid=13552>
- Sneddon, J. N. (2006). Colloquial Jakartan Indonesian. *Pacific Linguistics*, 581.
- Tudor-Owen, J., & Scott, A. J. (2016). Interviewing witnesses in Australia. In D. Walsh, G. E. Oxburgh, A. D. Redlich, & T. Myklebust (Eds.), *International Developments and Practices in Investigative Interviewing and Interrogation Volume 1: Victims and witnesses* (pp. 73-86). New York: Routledge.
- Vestheim, T. M. F. (2016). *International Programmes Highlights: 2015*. Retrieved from Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo: https://www.jus.uio.no/smr/english/about/programmes/news/docs/highlights_2015_web.pdf
- Westera, N. J., Zajac, R., & Brown, D. A. (2016). Witness interviewing practices in New Zealand. In D. Walsh, G. E. Oxburgh, A. D. Redlich, & T. Myklebust (Eds.), *International Developments and Practices in Investigative Interviewing and Interrogation Volume 1: Victims and witnesses* (pp. 87-98). New York: Routledge.

